

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Prancis yang merupakan anggota Uni Eropa menjadi salah satu negara yang dijadikan “destinasi favorit” oleh para imigran untuk memperoleh suaka politik atau hajat hidup yang lebih layak. Prancis menduduki peringkat ke-2 negara dengan persentase populasi imigran tertinggi di Uni Eropa dan peringkat ke-7 negara dengan persentase populasi imigran tertinggi di dunia (UN, 2019, p. 1). Kebijakan terkait dengan imigran yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis terus mengalami perkembangan dan dinamika yang kompleks. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki kesamaan yakni bersifat diskriminatif terhadap imigran. Saat ini, Prancis dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron yang mengesahkan *Asylum and Immigrations Act 2018* dan “Undang-Undang Penguatan Penghormatan Prinsip-Prinsip Republik” yang mempersulit imigran untuk memasuki wilayah Prancis dan mempermudah deportasi terhadap imigran. Selain itu, kebijakan Macron tersebut dianggap memperkuat sentimen anti Islam di Prancis sehingga sikap *Islamophobia* dan sentimen kebencian terhadap imigran yang berasal dari Timur Tengah atau negara-negara mayoritas Islam berkembang pesat di Prancis.

Prancis memiliki semboyan yakni “*liberte, egalite, fraternite*” yang artinya adalah “kebebasan, kesetaraan, persaudaraan” sehingga Prancis sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip sekulerisme, demokrasi, dan kebebasan. Semboyan “*liberte, egalite, fraternite*” adalah filosofi yang berfungsi menjadi *policy guidance* bagi pemerintah Prancis dalam merumuskan kebijakannya termasuk pula mengenai

imigran. Sikap pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Macron terkait dengan kebijakan imigran dianggap diskriminatif dan kontradiktif terhadap filosofi “*liberte, egalite, fraternite*” selaku *policy guidance*. Adapun kontradiksi tersebut terjadi karena negara cenderung bersifat kontekstual dalam menentukan suatu kebijakan sehingga konstruksi sosial atas persepsi negatif terhadap imigran di Prancis memiliki kaitan erat dengan nilai *laïcité* yang telah menjadi identitas nasional mereka. Meskipun bersifat non-material konstruksi nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan Prancis sebagai sebuah negara.

4.2 Saran

Skripsi berjudul “Kontradiksi Antara *Liberte, Egalite, Fraternite* dan Sikap Prancis terhadap Imigran di Era Presiden Emmanuel Macron” terfokus pada pembahasan terkait sikap kontradiktif yang ditunjukkan pemerintah Prancis dengan ideologinya dalam hal pembentukan kebijakan yang ditujukan oleh para imigran. Terbatas pada penggunaan gagasan konstruktivisme berbasis identitas tipe, maka tidak mengherankan jika temuan atau pembahasan dalam penelitian ini hanya berputar pada latar belakang Prancis sebagai negara yang menjunjung tinggi identitas masa lalu sebagai negara sekuler atau *laïcité*. Adanya identitas *laïcité* yang telah mengakar dalam kehidupan bernegara maupun masyarakat Prancis telah berhasil membentuk arah kebijakan terhadap imigran yang turut mengandung unsur diskriminasi di dalamnya. Keterbatasan konstruktivisme berbasis identitas tipe yang hanya mempertimbangkan unsur-unsur identitas atau jati diri suatu negara, maka pembahasan terkait penyebab lain seperti ekonomi, kepentingan negara,

ataupun hak asasi manusia tidak mendapatkan ruang pembahasan tersendiri dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk menggunakan gagasan atau perspektif yang lebih mampu menggali penyebab lain dari munculnya sikap kontradiktif pemerintah Prancis di dalam kebijakan imigran pada penelitian yang akan datang secara lebih komprehensif.

Lebih dari itu, penelitian ini juga mampu untuk memberikan gambaran serta masukan kepada pemerintah Indonesia sebagai negara yang turut menjadi negara “favorit” pencari suaka. Pemerintah Indonesia hendaknya merumuskan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai bangsa dan tidak bertentangan dengan nilai tersebut dalam implementasinya. Oleh karenanya, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menegaskan kembali legalitas perlindungan serta ketentuan bagi imigran yang ada di Indonesia agar keseimbangan antara hak dasar imigran sebagai manusia terpenuhi serta pemerintah Indonesia beserta seluruh masyarakat di dalamnya yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut tidak dirugikan sebagai akibat dari eksistensi imigran di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia hendaknya mengambil pelajaran untuk memperkuat perbatasan negara Indonesia mengingat kondisi teritorial Indonesia yang banyak terdiri dari lautan luas turut meningkatkan kemungkinan adanya penyusupan oleh imigran ilegal yang mana dapat mengancam keamanan Indonesia.